

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan sebagai sumberdaya hayati secara alami mengalami suatu proses yang panjang mengisi ruang dan waktu dengan keanekaragamannya yang bersifat materi. Di sisi lain sumberdaya manusia bersifat sosial budaya yang memanfaatkan, memusnahkan, ataupun dapat melestarikan sumberdaya tersebut (Irjayani, 2000).

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan secara fungsional mengandung arti sebagai suatu kesatuan lahan atau wilayah yang karena keadaan bio-fisiknya dan/atau fungsi ekonomisnya dan/atau fungsi sosialnya harus berwujud sebagai hutan (Republik Indonesia, 1999). Karena sifatnya yang demikian itu, peruntukan lahan tersebut harus ditetapkan dan dipertahankan sebagai hutan untuk selamanya. Itulah sebabnya mengapa kawasan hutan secara yuridis diartikan sebagai wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah (pusat) untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Rahmawaty, 2004).

Dalam pengelolaan hutan, ada beberapa pihak yang terkait dan masing-masing mempunyai kepentingan, diantaranya pemerintah, masyarakat dan swasta. Adanya perbedaan-perbedaan kepentingan ini seringkali menimbulkan konflik di antara pihak-pihak tersebut. Konflik pengelolaan sumberdaya hutan yang paling sering terlihat adalah konflik antara masyarakat sekitar hutan dengan pengelola hutan, yaitu pemerintah dan swasta yang dianggap mempunyai otoritas dalam mengelola sumberdaya hutan. Salah satu solusi dalam penyelesaian konflik tersebut yakni adanya pendekatan penyertaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan (Theresia, 2008).

Hutan sebagai bagian dari sumberdaya alam nasional memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, pembangunan maupun lingkungan hidup, sehingga perlu dibina dan dilindungi dari berbagai tindakan yang dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem dunia. Hutan bagi

kehidupan manusia dapat memberi manfaat berupa manfaat langsung dan manfaat yang tidak langsung. Kawasan hutan lindung memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air (hidrologi), pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Fungsi-fungsi ekologi, ekonomi dan sosial dari hutan akan memberikan peranan nyata bila pengelolaan hutan dilaksanakan seiring dengan upaya pelestarian dapat diwujudkan dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Di samping itu pengelolaan hutan sangat membantu pendapatan dan penerimaan devisa bagi negara dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat (Nasution, 2010).

Kawasan hutan di Kabupaten Bone Bolango seluas 134.156,83 ha, atau 71,41 % dari total luas daratan Bone Bolango 187.863,86 ha, yang terdiri dari kawasan hutan konservasi 104.739,50 ha, hutan lindung 15.228,28 ha, hutan produksi 836,45 ha dan hutan produksi terbatas 13.353 ha yang merupakan hulu dari daerah aliran sungai Bone. Kawasan hutan di daerah aliran sungai Bone merupakan ekosistem hutan hujan tropika pegunungan, kondisinya dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain faktor biologis, fisik, sosial, ekonomi dan budaya. Sebagai suatu kesatuan ekosistem kawasan tersebut mempunyai banyak manfaat yang dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat di sekitar kawasan. Manfaat jasa ekosistem bagi masyarakat di kawasan hutan ini antara lain berupa penyediaan sumber pakan ternak, kayu bakar, sumber air, sistem hidro-orologis, jasa wisata, budaya dan lainnya. Akses masyarakat ke dalam kawasan tersebut telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem kawasan hutan dan sekitarnya (Rauf, 2012).

Secara faktual diperkirakan lebih kurang 8.000 penambang emas tanpa ijin (PETI) telah melakukan kegiatan penambangan secara tradisional pada kawasan hutan tersebut. Kondisi ini berlangsung terus, sementara secara kelembagaan kapasitas kawasan hutan di daerah untuk mengendalikannya sangat terbatas. Masuknya masyarakat penambang ke kawasan hutan disertai dengan kegiatan penebangan liar yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Pendekatan

penegakan hukum (*law enforcement*) tidak dapat dilakukan secara efektif karena kapasitas organisasi unit manajemen kawasan hutan yang kurang berimbang terhadap besarnya permasalahan. Untuk itu perlu ditempuh upaya pendekatan lain untuk memecahkan konflik kepentingan ini. Di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa potensi pertambangan emas yang berada di kawasan hutan ini sebagai sumberdaya alam penting bagi daerah, yang jika memungkinkan untuk dimanfaatkan, dapat menjadi sumber pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan lindung selain melakukan penambangan diperkirakan mereka melakukan kegiatan seperti mencari kayu bakar, mencari daun pembungkus dan juga rotan demi kebutuhan hidup. Hal ini menggambarkan interaksi masyarakat lebih besar di dalam kawasan hutan lindung di bandingkan di luar kawasan, tanpa memperhatikan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang kehutanan demi menjaga kelestarian kawasan hutan itu sendiri.

Dari penjelasan di atas peneliti tertarik melakukan penelitian tentang kajian spasial sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di kawasan hutan lindung daerah aliran sungai Bone, untuk mengetahui kegiatan masyarakat di kawasan hutan lindung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi spasial sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di kawasan hutan lindung Daerah Aliran Sungai Bone ?
2. Bagaimana interaksi masyarakat dengan kawasan hutan lindung ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menggambarkan kondisi spasial sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di kawasan hutan lindung Daerah Aliran Sungai Bone
2. Menggambarkan interaksi masyarakat dengan kawasan hutan lindung

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi:

1. Pemerintah

Dapat dijadikan sebagai acuan dalam merencanakan kebijakan tentang ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di kawasan hutan lindung daerah aliran sungai Bone

2. Peneliti

- a. Sebagai bahan perbandingan antar ilmu yang dihadapi peneliti di bangku kuliah dan kenyataan di lapangan.
- b. Merupakan kontribusi pemikiran bagi peneliti dalam proses penerapan ilmu pengetahuan yang akan diperoleh khususnya tentang kajian ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di kawasan hutan lindung daerah aliran sungai bone

3. Ilmu Pengetahuan

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam memperkaya wawasan ilmu pengetahuan.